



## Dispenda Khawatirkan Pajak Galian C

Bulan April mestinya menjadi bulan optimisme Dispenda Karangasem karena ada potensi peningkatan pemasukan dari sektor galian C. Namun, melihat fenomena banyaknya galian yang tak bisa disentuh pajak, organisasi perangkat daerah yang kini sudah ganti nama menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu tetap mengkhawatirkan peluang meraup pendapatan besar dari sektor tersebut.

Berapakah realisasi PAD Karangasem dari sektor galian C ini?

**REALISASI** pajak pada triwulan pertama ini hanya Rp 7,6 miliar dari target APBD Induk Rp 78 miliar. Dengan fakta itu, ada nada pesimis target tinggi itu bisa tercapai. "Ya, kondisi pada triwulan pertama ini sama dengan periode yang sama tahun lalu," ungkap Kepala BPKAD I Nengah Mindra, Jumat (7/4) kemarin.

Tahun lalu, target pendapatan Karangasem dari sektor pertambangan mineral bukan logam itu juga ditetapkan Rp 78 miliar. Tapi, menurut Mindra, realisasinya kemudian hanya maksimal Rp 58 miliar. Kendurnya realisasi pajak itu, merupakan dampak dari masih adanya aktivitas penggalian di usaha-usaha yang kategori ilegal. Mengacu pada *legal opinion* dari Kejaksaan, BPKAD hanya boleh melakukan pemungutan pajak dari usaha legal.

Tahun ini, bayang-bayang kemerosotan tetap ada. Namun, mantan Kadis

Koperasi dan Penanaman Modal itu tetap optimis target yang dipatok tinggi itu akan tercapai. Menurut dia, sejauh ini realisasi pajak menjadi rendah kar-

ena pada triwulan pertama itu belum banyak proyek pemerintah yang berjalan. Pihaknya memprediksi situasinya akan berubah ketika proyek-proyek pemerintah sudah mulai bergulir.

"Biasanya proyek-proyek itu mulai bergulir April. Meningkatnya kebutuhan material secara otomatis berdampak terhadap capaian pajak," katanya.

Rendahnya capaian pajak galian C memberi pengaruh

sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karangasem secara umum. Sejah ini, pundi-pundi uang Karangasem dari pajak daerah baru Rp 21 miliar dari Rp 233 miliar PAD yang ditargetkan pada APBD Induk 2017. Untungnya ketika terjadi kemerosotan di sektor galian C, beberapa sektor lain mengalami kemajuan. Pajak Bea Perubahan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB)

salah satunya. Pada triwulan pertama realisasinya Rp 3,6 miliar dari target Rp 2,6 miliar. Pajak hotel juga surplus dari target Rp 3,7 miliar pada triwulan pertama, sudah tercapai Rp 4,3 miliar. Pajak restoran juga sama. Target triwulan Rp 1,7 miliar, realisasi 2,1 miliar. "Target Pajak Hotel tahun ini 18 miliar, Pajak Restoran Rp 8,8 miliar. Untuk PHR kita sangat optimis," ujar Mindra. (kmb)

Edisi : Sabtu 8 April 2017

Hal : 13